

DAFTAR ISI

A. <u>LATAR BELAKANG</u>	89
B. <u>TUJUAN</u>	89
C. <u>RUANG LINGKUP KEGIATAN</u>	89
D. <u>UNSUR YANG TERLIBAT</u>	90
E. <u>REFERENSI</u>	90
F. <u>PENGERTIAN DAN KONSEP</u>	91
G. <u>URAIAN PROSEDUR KERJA</u>	93
LAMPIRAN 1 : ALUR PROSEDUR KERJA ANALISIS KONDISI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN	95
LAMPIRAN 2 : RAMBU-RAMBU PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA	96
LAMPIRAN 3 : CONTOH INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA	97
LAMPIRAN 4 : CONTOH HASIL ANALISIS KONDISI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN	100

A. Latar Belakang

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan, yang berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Tujuan tertentu ini meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi dan potensi daerah, satuan pendidikan dan peserta didik. Oleh sebab itu, KTSP harus disusun sesuai dengan kebutuhan, karakteristik dan potensi satuan pendidikan (internal) serta lingkungan di daerah setempat.

Dalam Lampiran Peraturan menteri pendidikan nasional Nomor 22 Tahun 2006 dinyatakan bahwa pengembangan KTSP dilakukan dengan menerapkan beberapa prinsip pengembangan kurikulum yaitu antara lain "Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya" serta "beragam dan terpadu" dimana kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik, kondisi daerah, dan jenjang serta jenis pendidikan, tanpa membedakan agama, suku, budaya dan adat istiadat, serta status sosial ekonomi dan gender. Kurikulum SMA meliputi substansi komponen muatan wajib kurikulum, muatan lokal, dan pengembangan diri secara terpadu, serta disusun dalam keterkaitan dan kesinambungan yang bermakna dan tepat antarsubstansi. Oleh karena itu sebelum menyusun KTSP setiap sekolah harus terlebih dahulu melakukan analisis kondisi lingkungan satuan pendidikan (eksternal) yang meliputi komite sekolah, dewan pendidikan, dinas pendidikan, asosiasi profesi, dunia industri dan dunia kerja, sumber daya alam, dan sosial budaya.

Berdasarkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan bintek KTSP di SMA pada tahun 2009 diperoleh data dan informasi antara lain masih banyak sekolah yang belum memahami bahwa analisis konteks yang mencakup analisis kondisi satuan pendidikan (internal), analisis kondisi lingkungan (eksternal), dan analisis SNP merupakan salah satu prosedur kerja yang harus dilakukan oleh sekolah dalam rangka penyusunan KTSP dan penyusunan rencana kerja sekolah. Selain itu belum semua warga sekolah memahami pentingnya melakukan analisis konteks serta implementasinya dalam penyusunan KTSP dan penyusunan program kerja sekolah. Masalah lain adalah sekolah yang telah melakukan analisis konteks tidak mendokumentasikan dengan baik hasil analisis karena belum memahami bahwa dokumen tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen KTSP. Kenyataan ini ditunjang pula dengan tidak adanya naskah panduan yang dapat dijadikan acuan bagi sekolah untuk melakukan analisis kondisi lingkungan eksternal satuan pendidikan secara benar dan hasil dapat dimanfaatkan secara optimal.

Berkaitan dengan permasalahan/kendala dan masukan tersebut untuk membantu sekolah agar dapat melakukan analisis kondisi lingkungan eksternal satuan pendidikan, Direktorat Pembinaan SMA menyusun dan menerbitkan "Petunjuk Teknis Analisis Kondisi Lingkungan Eksternal Satuan Pendidikan di SMA".

B. Tujuan

Tujuan penyusunan petunjuk teknis ini sebagai acuan bagi SMA dalam menyusun Analisis Kondisi Lingkungan Eksternal Satuan Pendidikan sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang telah ditetapkan. Hasil analisis dimanfaatkan untuk menyusun KTSP dan penyusunan program kerja sekolah.

C. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup juknis analisis kondisi lingkungan eksternal satuan pendidikan ini mencakup kegiatan:

1. Penugasan TPK untuk melakukan analisis.

2. Penyusunan rencana dan jadwal pelaksanaan kegiatan analisis .
3. Penyusunan perangkat analisis (rambu-rambu dan instrumen pengumpulan dan pengolahan data).
4. Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi serta penyusunan draf hasil analisis.
5. Pembahasan, penyempurnaan dan finalisasi hasil analisis .
6. Penandatanganan dokumen hasil analisis.
7. Penggandaan dan pendistribusian hasil analisis.

D. Unsur yang Terlibat

1. Kepala sekolah,
2. Tim Pengembang Kurikulum (TPK) sekolah,
3. Dewan Guru,
4. Komite Sekolah.

E. Referensi

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Wewenang antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota .
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi .
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah .
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan .
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan oleh Pemerintah Daerah .
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah .
9. Panduan penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, BSNP, Tahun 2006.
10. Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (2008), Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

F. Pengertian dan Konsep

1. Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 36 ayat 2).
2. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan (Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Bab I Pasal 1 butir 15). KTSP dikembangkan sesuai dengan potensi, karakteristik, kebutuhan satuan pendidikan dan daerah/lingkungan setempat (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi).
3. Kurikulum dilaksanakan dengan memanfaatkan kondisi alam, sosial dan budaya serta kekayaan daerah untuk keberhasilan pendidikan dengan muatan seluruh bahan kajian secara optimal (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Lampiran Bab II A. Butir 3.f).
4. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab I Pasal 1 butir 10).
5. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 4 ayat (6)).
6. Dalam penyusunan KTSP Satuan Pendidikan perlu terlebih dahulu melakukan analisis konteks yang mencakup:
 - a. Analisis SNP sebagai acuan dalam penyusunan KTSP (Standar Isi, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Proses, Standar Penilaian, dan Standar Pengelolaan).
 - b. Analisis kondisi yang ada di satuan pendidikan yang meliputi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, biaya, dan program-program.
 - c. Analisis kondisi lingkungan satuan pendidikan (eksternal) misalnya: komite sekolah, dewan pendidikan, dinas pendidikan, asosiasi profesi, dunia industri dan dunia kerja, sumber daya alam dan sosial budaya. (Panduan KTSP yang diterbitkan BSNP - IV.A).
7. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, atau menguraikan suatu pokok atas berbagai bagian itu sendiri serta hubungan antarbagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan (kamus besar bahasa Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2008).
8. Analisis kondisi lingkungan satuan pendidikan adalah proses pengkajian lingkungan sekolah yang difokuskan untuk memperoleh data dan informasi tentang *peluang, tantangan, dan rencana tindak lanjut*”, sebagai acuan bagi sekolah dalam proses pengembangan KTSP dan penyusunan program kerja sekolah.
9. Peluang adalah kondisi komponen lingkungan satuan pendidikan yang bersifat positif dan mendukung pendidikan di sekolah, minimal sama dengan kondisi ideal.
10. Tantangan adalah kondisi komponen lingkungan eksternal satuan pendidikan yang bersifat negatif dan kurang mendukung pendidikan di sekolah.
11. Kesenjangan adalah tantangan nyata yang dihadapi oleh sekolah dari setiap komponen sumber daya, sebagai bahan dalam menetapkan rencana tindak lanjut.
12. Rencana tindak lanjut adalah upaya yang akan dilakukan oleh sekolah untuk memanfaatkan peluang dan memperkecil hambatan/mengatasi tantangan.
13. Komite Sekolah adalah Badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di Satuan

Pendidikan.(Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah,Lampiran II. Butir A.I.1).

14. Peran dan Fungsi Komite Sekolah
 - a. Komite Sekolah berperan sebagai :
 - 1) Pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan.
 - 2) Pendukung, baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan.
 - 3) Pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan pengeluaran pendidikan dalam satuan pendidikan.
 - 4) Mediator antara pemerintah dengan masyarakat di satuan pendidikan.
 - b. Komite Sekolah berfungsi sebagai berikut:
 - 1) Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
 - 2) Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
 - 3) Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diharapkan oleh masyarakat.
 - 4) Memberi masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai:
 - Kebijakan dan program pendidikan .
 - Rencana anggaran pendidikan dan belanja sekolah (RAPBS) .
 - Kriteria kinerja satuan pendidikan .
 - Kriteria tenaga kependidikan .
 - Kriteria fasilitas pendidikan .
 - Hal- hal lain yang berkaitan dengan pendidikan .
 - 5) Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan .
 - 6) Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
 - 7) Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di suatu satuan pendidikan.
15. Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. (Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 butir 25) .
16. Komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan(Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab XIV Pasal 56 ayat 3) .
17. Dewan Pendidikan adalah badan yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di Kabupaten/Kota(Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, Lampiran I. butir A.I.1).
18. Asosiasi profesi adalah perkumpulan orang yang memiliki profesi yang sama dan mempunyai kepentingan yang sama pula (kamus besar bahasa Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2008).
19. Sumber daya adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang digunakan untuk mencapai hasil, misal peralatan, sediaan, waktu dan tenaga

(Kamus Besar Bahasa Indonesia, Depdiknas, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2008).

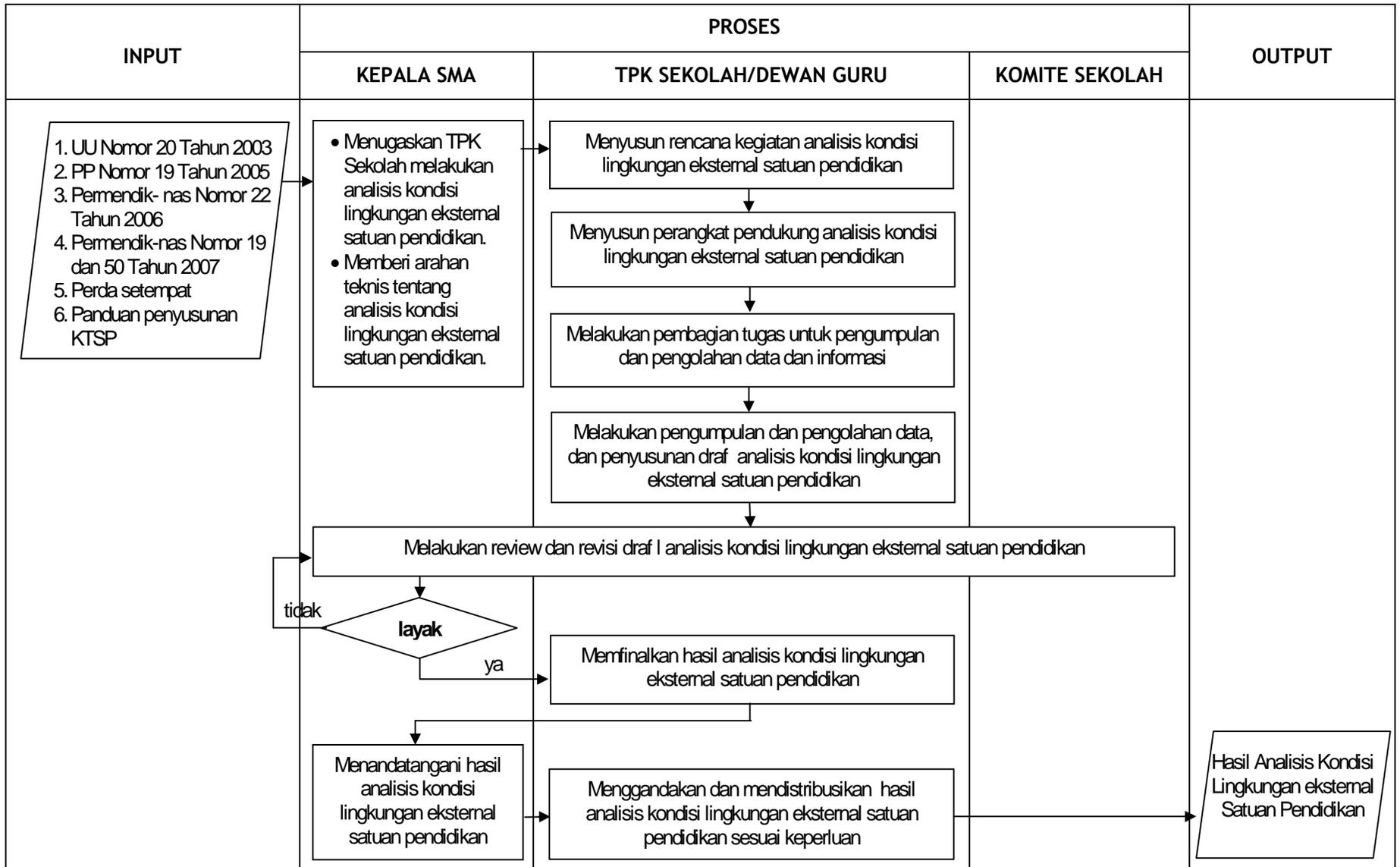
20. Sumber daya alam adalah potensi alam yang dapat dikembangkan untuk proses produksi (Kamus Besar Bahasa Indonesia, Depdiknas, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2008).
21. Ruang lingkup data dan informasi kondisi lingkungan eksternal satuan pendidikan terdiri atas:
 - a. Komite sekolah, mencakup data tentang peran dan fungsi komite sekolah .
 - b. Dewan Pendidikan, mencakup data tentang peran dan fungsi Dewan Pendidikan .
 - c. Dinas pendidikan, mencakup data tentang kewenangan dalam kebijakan dan pembinaan yang dilakukan bagi satuan pendidikan .
 - d. Asosiasi profesi, mencakup data tentang bentuk kerjasama dalam mengembangkan sumber daya manusia baik untuk pendidik maupun untuk tenaga kependidikan .
 - e. Dunia industri dan dunia kerja, mencakup data tentang berbagai hal yang terkait kerjasama antara satuan pendidikan dengan dunia usaha dan berbagai hal terkait kebutuhan dunia kerja yang mampu dipersiapkan oleh stuan pendidikan sesuai tuntutan dan kebutuhan dunia industri dan dunia kerja .
 - f. Sumber daya alam, mencakup data tentang potensi alam yang dimiliki oleh lingkungan satuan pendidikan yang mampu untuk dikembangkan sesuai dengan harapan masyarakat setempat .
 - g. Data mengenai keberadaan dunia industri/dunia kerja, kondisi sumber daya alam dan sosial budaya dapat diperoleh dari Pemda setempat (Desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi) dan internet .
22. Instrumen pengumpulan dan pengolahan data analisis kondisi lingkungan eksternal satuan pendidikan meliputi komponen, kondisi ideal, kondisi riil (terdiri dari peluang dan tantangan), kesenjangan dan rencana tindak lanjut.
23. Pengolahan data dilakukan dengan cara memilah data yang terkumpul dari setiap komponen lingkungan satuan pendidikan dan memilih bagian terpenting yang berkaitan antara kondisi ideal dengan kondisi riil yang memuat peluang dan tantangan baik berupa data kuantitatif maupun kualitatif .
24. Tim Pengembang Kurikulum sekolah yang selanjutnya disebut TPK Sekolah adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Sekolah yang bertugas untuk merancang dan mengembangkan kurikulum, yang terdiri atas wakil kepala sekolah, pendidik, tenaga kependidikan, Guru BK/konselor, dan kepala sekolah sebagai ketua merangkap anggota.

G. Uraian Prosedur Kerja

1. Kepala SMA menugaskan TPK Sekolah untuk melakukan analisis kondisi lingkungan eksternal satuan pendidikan.
2. Kepala Sekolah memberikan arahan teknis tentang analisis kondisi lingkungan eksternal satuan pendidikan yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Dasar pelaksanaan analisis kondisi lingkungan eksternal satuan pendidikan.
 - b. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan analisis kondisi lingkungan eksternal satuan pendidikan.
 - c. Manfaat analisis kondisi lingkungan eksternal satuan pendidikan.
 - d. Hasil yang diharapkan dari analisis kondisi lingkungan eksternal satuan pendidikan.
 - e. Unsur-unsur yang terlibat dan uraian tugas dalam pelaksanaan analisis kondisi lingkungan eksternal satuan pendidikan.

3. TPK sekolah menyusun rencana kegiatan yang memuat antara lain: uraian kegiatan, sasaran/hasil, pelaksana kegiatan dan waktu/jadwal pelaksanaan kegiatan analisis, yang mencakup:
 - a. Penyusunan perangkat pendukung analisis (Rambu-rambu dan Instrumen pengumpulan dan pengolahan data).
 - b. Pengumpulan data kondisi lingkungan eksternal satuan pendidikan.
 - c. Pengolahan data kondisi lingkungan eksternal satuan pendidikan.
 - d. Penyusunan draf hasil analisis.
 - e. Pembahasan, penyempurnaan dan finalisasi draf hasil analisis.
 - f. Penandatanganan hasil analisis.
 - g. Penggandaan dan pendistribusian hasil analisis.
4. TPK sekolah menyusun perangkat pendukung analisis yang terdiri atas rambu-rambu dan Instrumen pengumpulan dan pengolahan data, dengan memperhatikan ruang lingkup data dan informasi kondisi lingkungan eksternal satuan pendidikan.
5. TPK Sekolah melakukan pembagian tugas untuk pengumpulan dan pengolahan data dan informasi kondisi lingkungan eksternal satuan pendidikan berdasarkan komponen-komponen yaitu komite sekolah, dewan pendidikan, dinas pendidikan, asosiasi profesi, dunia industri/dunia kerja dan sumber daya alam .
6. TPK sekolah melakukan:
 - a. Pengumpulan data kondisi lingkungan eksternal satuan pendidikan, dengan menggunakan instrumen yang telah disusun oleh TPK .
 - b. Pengolahan data kondisi lingkungan eksternal satuan pendidikan.
 - c. Penyusunan draf l analisis yang memuat kondisi ideal, kondisi riil, kesenjangan dan upaya tindak lanjut baik berupa data kuantitatif maupun kualitatif.
7. Kepala sekolah bersama TPK sekolah/dewan guru dan komite sekolah melakukan reuiu dan revisi draf hasil analisis.
8. TPK sekolah menyempurnakan dan memfinalkan hasil analisis .
9. Kepala Sekolah menandatangani hasil analisis .
10. TPK menggandakan sesuai kebutuhan dan mendistribusikan hasil analisis kepada dewan guru, komite sekolah dan pihak lain yang memerlukan , sebagai bahan untuk menyusun laporan analisis konteks, penyusunan KTSP dan penyusunan program kerja sekolah.

Lampiran 1 : Alur Prosedur Kerja Analisis Kondisi Lingkungan Satuan Pendidikan



Lampiran 2 : Rambu-Rambu Pengumpulan Dan Pengolahan Data

Rambu-rambu Pengumpulan dan Pengolahan Data.

Secara garis besar rambu-rambu dalam analisis kondisi lingkungan eksternal satuan pendidikan dapat dikelompokkan dalam dua aktivitas yang meliputi :

A. Proses Pengumpulan Data

Satuan pendidikan dapat meminta data secara lengkap kepada Pemerintah Daerah setempat mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, tingkat kabupaten/kota dan propinsi.

Untuk data yang berkaitan dengan lembaga seperti Dunia usaha dan industri diperoleh dengan melakukan kunjungan kerja ke instansi yang bersangkutan atau mengajukan data kepada lembaga/dinas terkait yang berisi jenis usaha dan kebutuhan akan tenaga kerja.

Data yang berkaitan dengan Dewan pendidikan dan Komite Sekolah dapat dikaitkan dengan peran dan fungsinya sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/ 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

B. Proses Pengolahan Data

Pengolahan data dalam menganalisis kondisi lingkungan satuan pendidikan berdasarkan instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data yang meliputi :

1. Nama Dokumen
2. Nama satuan pendidikan
3. Tahun Pelajaran
4. Alamat lengkap
5. Komponen Analisis
 - a. No. Urut
 - b. Komponen, meliputi Dewan Pendidikan, Komite Sekolah, Dunia Industri/Usaha, Dinas pendidikan Kabupaten/Kota atau Propinsi, Perguruan Tinggi, LPMP, organisasi profesi
 - c. Kondisi ideal adalah kondisi yang diharapkan oleh satuan pendidikan minimal sesuai dengan standar.
 - d. Kondisi riil adalah kondisi nyata yang terjadi/terdapat di lingkungan eksternal satuan pendidikan, sehingga nampak adanya peluang dan tantangan.
 - e. Kesenjangan adalah situasi atau keadaan ketidaksesuaian antara kondisi ideal dengan kondisi riil

- f. Rencana tindak lanjut merupakan upaya yang akan dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengurangi kesejangan yang terjadi, berupa aktivitas yang dilengkapi dengan tanggal pelaksanaan dan penanggung jawab kegiatan.

C. Hasil Analisis

Data hasil analisis berisi data kuantitatif dan data kualitatif. Hasil Analisis Kondisi Lingkungan Satuan Pendidikan merupakan angka dan kalimat deskripsi kualitatif yang memberikan gambaran umum tentang kesenjangan dan upaya tindak lanjut yang akan digunakan sebagai salah satu bahan dalam penyusunan dokumen KTSP dan rencana kerja sekolah baik rencana tahunan maupun rencana jangka menengah (4 tahunan).

Lampiran 3 : Contoh Instrumen Pengumpulan Data

INSTRUMEN ANALISIS KONDISI LINGKUNGAN EKSTERNAL SATUAN PENDIDIKAN

Nama Sekolah : . . .

Alamat Sekolah : . . .

Tahun Pelajaran : . . .

A. KOMITE SEKOLAH

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	IMPLEMENTASI DI SEKOLAH	KET.
1	Organisasi/Pengelolaan	a. Struktur	1. . . .	
			2. . . .dst	
		b. Peran dan Fungsi	1. . . .	
			2. . . .dst	
2	Program/Kegiatan	a. Bidang Keterlibatan	1. . . .	
			2. . . .dst	

		b. Bentuk Kegiatan	1. . . .	
			2. . . .dst	
3	Jenis Dukungan	a. Dukungan Kebijakan/	1. . . .	
			2. . . .dst	
		b. Dukungan Fisik (Material)	1. . . .	
			2. . . .dst	

B. DINAS PENDIDIKAN

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	IMPLEMENTASI DI SEKOLAH	KET.
1	Organisasi/Pengelolaan	a. Struktur	1. . . .	
			2. . . .dst	
		b. Peran dan Fungsi	1. . . .	
			2. . . .dst	
2	Program/Kegiatan	a. Bidang Keterlibatan	1. . . .	
			2. . . .dst	
		b. Bentuk Kegiatan	1. . . .	
			2. . . .dst	
3	Jenis Dukungan	a. Dukungan Kebijakan/ Non Fisik	1. . . .	
			2. . . .dst	
		b. Dukungan Fisik	1. . . .	

	(Material)		
		2. . . .dst	

C. ASOSIASI PROFESI

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	IMPLEMENTASI DI SEKOLAH	KET.
1	Organisasi/Pengelolaan	a. Struktur	1. . . .	
			2. . . .dst	
		b. Peran dan Fungsi	1. . . .	
			2. . . .dst	
2	Program/Kegiatan	a. Bidang Keterlibatan	1. . . .	
			2. . . .dst	
		b. Bentuk Kegiatan	1. . . .	
			2. . . .dst	
3	Jenis Dukungan	a. Dukungan Kebijakan/ Non Fisik	1. . . .	
			2. . . .dst	
		b. Dukungan Fisik (Material)	1. . . .	
			2. . . .dst	

D. DUNIA USAHA DAN DUNIA KERJA

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	IMPLEMENTASI DI SEKOLAH	KET.
1	Organisasi/Pengelolaan	a. Struktur	1. . . .	
			2. . . .dst	
		b. Peran dan Fungsi	1. . . .	
			2. . . .dst	
2	Program/Kegiatan	a. Bidang Keterlibatan	1. . . .	

			2. . . .dst	
		b. Bentuk Kegiatan	1. . . .	
			2. . . .dst	
3	Jenis Dukungan	b. Dukungan Kebijakan/ Non Fisik	1. . . .	
			2. . . .dst	
		b. Dukungan Fisik (Material)	1. . . .	
			2. . . .dst	

Lampiran 4 : Contoh Hasil Analisis Kondisi Lingkungan Satuan Pendidikan

HASIL ANALISIS KONDISI LINGKUNGAN EKSTERNAL SATUAN PENDIDIKAN

Nama Sekolah : . . .
 Alamat Sekolah : . . .
 Tahun Pelajaran : . . .

NO	KOMPONEN	KONDISI IDEAL	KONDISI RIIL		RENCANA TINDAK LANJUT
			PELUANG	TANTANGAN	

NO	KOMPONEN	KONDISI IDEAL	KONDISI RIIL		RENCANA TINDAK LANJUT
			PELUANG	TANTANGAN	
1.	Komite sekolah	<p>Komite Sekolah berperan sebagai :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberi pertimbangan 2. Pendukung finansial dan pemikiran 3. Pengontrol transparansi dan akuntabilitas 4. Mediator antara pemerintah dan masyarakat <p>Fungsi Komite Sekolah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen mutu pendidikan 2. Melakukan kerja sama 3. Menampung aspirasi 4. Memberikan masukan dan rekomendasi 5. Mendorong partisipasi 6. Menggalang dana 7. Melakukan evaluasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Komite sekolah memiliki potensi sebagai nara sumber dalam peningkatan mutu sekolah • Komite sekolah memiliki potensi membantu sekolah dalam pemenuhan sarpras yang dibutuhkan dengan menggalang dana dari masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Komite Sekolah yang ada, belum berperan sebagaimana mestinya • Isu dan Peraturan daerah tentang kebijakan pendidikan gratis 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengundang unsur komite sekolah yang berpotensi sebagai nara sumber dalam peningkatan mutu sekolah, Juli 2010, Wakil kepala Sekolah Bidang Kurikulum • Mengundang pemerintah Daerah untuk duduk bersama dalam mensukseskan program sekolah yang membutuhkan dana dari masyarakat . Agustus 2010, Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas
2.	Dinas Pendidikan
3	Assosiasi Profesi
4	Dunia Usaha/Dunia Kerja	Setiap Dunia usaha/dunia kerja memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya termasuk institusi pendidikan atau sekolah. Melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> • Keberadaan DU/DK di sekitar sekolah cukup banyak 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepedulian DU/DK untuk mendukung program-program sekolah masih rendah 	<ul style="list-style-type: none"> • Menjalin kerja-sama dengan DU/DK untuk mendukung program sekolah dengan perusahaan yang ada. September 2010, Wakil kepala sekolah bidang Humas.

NO	KOMPONEN	KONDISI IDEAL	KONDISI RIIL		RENCANA TINDAK LANJUT
			PELUANG	TANTANGAN	
5	dst